



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 32 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR  
78 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran penata-usahaan keuangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015;
  - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan khususnya dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015, yang berkaitan dengan perubahan indeks unit cost dana BOS Tahun 2015 dan adanya pergeseran anggaran ke Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Semarang pembangunan pasar sementara akibat kebakaran pasar johan Kota Semarang telah diterbitkannya Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/007870 tanggal 17 Juni 2015 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan Mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA. 2015 dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/126/2015 tentang Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015;

*YB*

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perben- daharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peme- riksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 17);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
20. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1961);
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 78);

13

22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 78 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 78), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 11.696.822.243.000,00
b. Dana perimbangan	Rp. 2.694.385.621.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	<u>Rp. 3.670.525.400.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 18.061.733.264.000,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja pegawai	Rp. 2.451.025.833.000,00
2) Belanja bunga	Rp. 0,00
3) Belanja subsidi	Rp. 0,00
4) Belanja hibah	Rp. 3.877.114.583.000,00
5) Belanja bantuan sosial	Rp. 28.557.200.000,00
6) Belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota	Rp. 4.295.303.353.000,00
7) Belanja bantuan keuangan Kepada Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	Rp. 1.960.951.895.000,00
8) Belanja tidak terduga	<u>Rp. 16.443.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp. 12.629.395.864.000,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja pegawai	Rp. 349.994.085.000,00
--------------------	------------------------

2) Belanja barang dan jasa	Rp. 2.645.250.074.000,00
3) Belanja modal	Rp. 2.677.093.241.000,00
Jumlah belanja langsung	<u>Rp. 5.672337.400.000,00</u>
Jumlah Belanja	Rp. 18.301.733.264.000,00
Defisit	( <u>Rp. 240.000.000.000,00</u> )

3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	Rp. 450.000.000.000,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 210.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp. 240.000.000.000,00</u>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

Rp. N I H I L

2. Ketentuan Lampiran I diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan Lampiran II pada Urusan Pemerintahan - Otda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian (Kode Rekening 1.20) pada Unit Kerja Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dengan (Kode Rekening 1.20.00) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
4. Ketentuan Lampiran III pada Belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
5. Ketentuan Lampiran V pada Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Semarang diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 3 Juli 2015

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 3 Juli 2015

Pih. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

DJOKO SUTRISNO

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 32 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 78  
 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

RINGKASAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI  
 JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>17.097.686.334.000</b>	<b>18.061.733.264.000</b>	<b>964.046.930.000</b>	<b>5,64</b>
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>11.696.822.243.000</b>	<b>11.696.822.243.000</b>	-	-
4.1.1.	PAJAK DAERAH	10.266.079.853.000	10.266.079.853.000	-	-
4.1.2.	RETRIBUSI DAERAH	84.022.367.000	84.022.367.000	-	-
4.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	319.188.988.000	319.188.988.000	-	-
4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	1.027.531.035.000	1.027.531.035.000	-	-
<b>4.2.</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>2.694.385.621.000</b>	<b>2.694.385.621.000</b>	-	-
4.2.1.	DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	832.481.792.000	832.481.792.000	-	-
4.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	1.803.931.189.000	1.803.931.189.000	-	-
4.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	57.972.640.000	57.972.640.000	-	-
<b>4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>2.706.478.470.000</b>	<b>3.670.525.400.000</b>	<b>964.046.930.000</b>	<b>36</b>
4.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	29.888.000.000	29.888.000.000	-	-
4.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	2.676.590.470.000	3.640.637.400.000	964.046.930.000	36
4.3.6.	DANA INSENTIF DAERAH	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>17.337.686.334.000</b>	<b>18.301.733.264.000</b>	<b>964.046.930.000</b>	<b>5,56</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>11.665.348.934.000</b>	<b>12.629.395.864.000</b>	<b>964.046.930.000</b>	<b>8</b>
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.451.025.833.000	2.451.025.833.000	-	-
5.1.4.	BELANJA HIBAH	2.913.067.653.000	3.877.114.583.000	964.046.930.000	33
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	28.557.200.000	28.557.200.000	-	-
5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA KABUPATEN/KOTA	4.295.303.353.000	4.295.303.353.000	-	-
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	1.947.394.895.000	1.960.951.895.000	13.557.000.000	1
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.000.000.000	16.443.000.000	(13.557.000.000)	(45)
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>5.672.337.400.000</b>	<b>5.672.337.400.000</b>	-	-
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	349.994.085.000	349.994.085.000	-	-
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.645.250.074.000	2.645.250.074.000	-	-
5.2.3.	BELANJA MODAL	2.677.093.241.000	2.677.093.241.000	-	-
	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(240.000.000.000)</b>	<b>(240.000.000.000)</b>	-	-
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>240.000.000.000</b>	<b>240.000.000.000</b>	-	-
<b>6.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>450.000.000.000</b>	<b>450.000.000.000</b>	-	-
6.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA (SILPA)	450.000.000.000	450.000.000.000	-	-
<b>6.2.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>210.000.000.000</b>	<b>210.000.000.000</b>	-	-
6.2.1.	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	160.000.000.000	160.000.000.000	-	-
6.2.2.	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	50.000.000.000	50.000.000.000	-	-
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>240.000.000.000</b>	<b>240.000.000.000</b>	-	-
<b>6.3.</b>	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b>	-	-	-	-

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR **32 TAHUN 2015**  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 78 TAHUN  
 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PERINCIAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI  
 JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN  
 ORGANISASI : 1.20.00. - SKPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp )		Bertambah/(Berkurang)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20 00 00 00 4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>6.940.053.079.000</b>	<b>7.904.100.009.000</b>	<b>964.046.930.000</b>	<b>13,9</b>	
1.20 1.20 00 00 00 4 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>1.539.188.988.000</b>	<b>1.539.188.988.000</b>	-		
1.20 1.20 00 00 00 4 2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>2.694.385.621.000</b>	<b>2.694.385.621.000</b>	-		
1.20 1.20 00 00 00 4 3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>2.706.478.470.000</b>	<b>3.670.525.400.000</b>	<b>964.046.930.000</b>	<b>35,6</b>	
1.20 1.20 00 00 00 4 3 1	<b>PENDAPATAN HIBAH</b>	<b>29.888.000.000</b>	<b>29.888.000.000</b>	-		
1.20 1.20 00 00 00 4 3 4	<b>DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS</b>	<b>2.676.590.470.000</b>	<b>3.640.637.400.000</b>	<b>964.046.930.000</b>	<b>36,0</b>	
1.20 1.20 00 00 00 4 3 4 01	Dana Penyesuaian	2.676.590.470.000	3.640.637.400.000	964.046.930.000		
1.20 1.20 00 00 00 4 3 4 01 02	Bantuan Operasional Sekolah	2.676.590.470.000	3.640.637.400.000	964.046.930.000		
1.20 1.20 00 00 00 5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>9.236.323.101.000</b>	<b>10.200.370.031.000</b>	<b>964.046.930.000</b>	<b>10,4</b>	
1.20 1.20 00 00 00 5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>9.236.323.101.000</b>	<b>10.200.370.031.000</b>	<b>964.046.930.000</b>	<b>10,4</b>	
1.20 1.20 00 00 00 5 1 1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>22.000.000.000</b>	<b>22.000.000.000</b>	-	-	
1.20 1.20 00 00 00 5 1 4	<b>BELANJA HIBAH</b>	<b>2.913.067.653.000</b>	<b>3.877.114.583.000</b>	<b>964.046.930.000</b>	<b>33,1</b>	

*f*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		Bertambah/(Berkurang)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp.)	(%)	
1.20 1.20 00 00 00 5 1 4 01	Belanja Hibah Kepada Pemerintah	5.200.000.000	5.200.000.000	-	-	
1.20 1.20 00 00 00 5 1 4 06	Belanja Hibah Kepada Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan	231.277.183.000	231.277.183.000	-	-	
1.20 1.20 00 00 00 5 1 4 07	Belanja Hibah Dana BOS	2.676.590.470.000	3.640.637.400.000	964.046.930.000	36,0	
1.20 1.20 00 00 00 5 1 4 07 01	Belanja Hibah Dana BOS kepada Kabupaten Semarang	72.042.310.000	98.678.000.000	26.635.690.000		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 4 07 02	Belanja Hibah Dana BOS kepada Kabupaten Kendal	76.281.680.000	103.460.400.000	27.178.720.000		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 4 07 03	Belanja Hibah Dana BOS kepada Kabupaten Demak	75.952.700.000	102.763.600.000	26.810.900.000		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 4 07 04	Belanja Hibah Dana BOS kepada Kabupaten Grobogan	112.270.610.000	152.137.000.000	39.866.390.000		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 4 07 05	Belanja Hibah Dana BOS kepada Kabupaten Pati	80.925.920.000	110.476.600.000	29.550.680.000		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 4 07 06	Belanja Hibah Dana BOS kepada Kabupaten Kudus	53.528.730.000	72.833.200.000	19.304.470.000		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 4 07 07	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Jepara	76.314.720.000	104.405.400.000	28.090.680.000		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 4 07 08	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Rembang	45.019.900.000	61.640.400.000	16.620.500.000		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 4 07 09	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Blora	69.031.080.000	92.435.600.000	23.404.520.000		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 4 07 10	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Pekalongan	69.144.250.000	93.669.800.000	24.525.550.000		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 4 07 11	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Batang	55.160.740.000	75.006.400.000	19.845.660.000		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 4 07 12	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Pemasang	124.842.460.000	171.135.600.000	46.293.140.000		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 4 07 13	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Tegal	113.740.220.000	156.358.400.000	42.618.180.000		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		Bertambah/(Berkurang)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20 00 00 00 5 1 4 07 14	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Brebes	136.621.220.000	187.519.800.000	50.898.580.000		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 4 07 15	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Banyumas	128.844.710.000	179.163.200.000	50.318.490.000		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 4 07 16	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Cilacap	152.384.760.000	206.724.200.000	54.339.440.000		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 4 07 17	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Purbalingga	69.973.940.000	96.286.400.000	26.312.460.000		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 4 07 18	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Banjarnegara	70.983.580.000	95.855.800.000	24.872.220.000		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 4 07 19	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Magelang	82.767.170.000	111.462.000.000	28.694.830.000		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 4 07 20	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Temanggung	54.143.410.000	73.562.800.000	19.419.390.000		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 4 07 21	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Wonosobo	66.741.840.000	90.800.200.000	24.058.360.000		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 4 07 22	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Purworejo	62.295.480.000	85.344.000.000	23.048.520.000		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 4 07 23	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Kebumen	105.106.400.000	142.765.600.000	37.659.200.000		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 4 07 24	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Klaten	95.444.880.000	128.891.400.000	33.446.520.000		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 4 07 25	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Boyolali	70.682.750.000	95.132.200.000	24.449.450.000		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 4 07 26	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Sragen	74.102.530.000	99.987.000.000	25.884.470.000		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		Bertambah/(Berkurang)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20 00 00 00 5 1 4 07 27	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Sukoharjo	59.745.130.000	80.146.400.000	20.401.270.000		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 4 07 28	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Karanganyar	65.814.200.000	90.204.800.000	24.390.600.000		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 4 07 29	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Wonogiri	79.585.850.000	103.094.200.000	23.508.350.000		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 4 07 30	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Semarang	132.480.690.000	180.322.600.000	47.841.910.000		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 4 07 31	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Pekalongan	22.234.160.000	31.005.200.000	8.771.040.000		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 4 07 32	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Surakarta	63.580.460.000	86.355.800.000	22.775.340.000		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 4 07 33	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Salatiga	17.756.490.000	24.057.000.000	6.300.510.000		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 4 07 34	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Tegal	25.110.070.000	34.665.400.000	9.555.330.000		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 4 07 35	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Magelang	15.935.430.000	22.291.000.000	6.355.570.000		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 4 07 36	Dana Cadangan	-	-	-		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 5	<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL</b>	<b>28.557.200.000</b>	<b>28.557.200.000</b>	-	-	
1.20 1.20 00 00 00 5 1 6	<b>BELANJA BAGI HASIL KEPADA KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.295.303.353.000</b>	<b>4.295.303.353.000</b>	-	-	
1.20 1.20 00 00 00 5 1 07	<b>BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>1.947.394.895.000</b>	<b>1.960.951.895.000</b>	<b>13.557.000.000</b>	<b>0,7</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		Bertambah/(Berkurang)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20 00 00 00 5 1 07 02	<b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota</b>	<b>1.596.003.840.000</b>	<b>1.609.560.840.000</b>	<b>13.557.000.000</b>	<b>0,8</b>	
1.20 1.20 00 00 00 5 1 07 02 01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Semarang	33.131.389.000	33.131.389.000	-		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 07 02 02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kendal	28.765.718.000	28.765.718.000	-		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 07 02 03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Demak	59.534.318.000	59.534.318.000	-		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 07 02 04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Grobogan	46.087.046.000	46.087.046.000	-		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 07 02 05	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Pati	59.619.326.000	59.619.326.000	-		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 07 02 06	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kudus	61.532.142.000	61.532.142.000	-		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 07 02 07	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Jepara	59.791.505.000	59.791.505.000	-		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 07 02 08	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Rembang	50.327.119.000	50.327.119.000	-		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 07 02 09	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Blora	57.416.311.000	57.416.311.000	-		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 07 02 10	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Pekalongan	32.782.129.000	32.782.129.000	-		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 07 02 11	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Batang	48.565.754.000	48.565.754.000	-		

YB

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		Bertambah/(Berkurang)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20 00 00 00 5 1 07 02 12	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Pemalang	34.037.049.000	34.037.049.000	-		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 07 02 13	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Tegal	35.283.726.000	35.283.726.000	-		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 07 02 14	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Brebes	69.850.422.000	69.850.422.000	-		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 07 02 15	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Banyumas	67.162.351.000	67.162.351.000	-		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 07 02 16	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Cilacap	71.803.551.000	71.803.551.000	-		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 07 02 17	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Purbalingga	40.732.456.000	40.732.456.000	-		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 07 02 18	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Banjarnegara	49.605.846.000	49.605.846.000	-		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 07 02 19	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Magelang	30.587.834.000	30.587.834.000	-		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 07 02 20	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Temanggung	53.211.326.000	53.211.326.000	-		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 07 02 21	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Wonosobo	63.141.488.000	63.141.488.000	-		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 07 02 22	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Purworejo	27.650.024.000	27.650.024.000	-		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 07 02 23	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kebumen	62.747.312.000	62.747.312.000	-		

*f*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		Bertambah/(Berkurang)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20 00 00 00 5 1 07 02 24	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Klaten	37.829.099.000	37.829.099.000	-		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 07 02 25	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Boyolali	32.580.805.000	32.580.805.000	-		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 07 02 26	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sragen	56.015.344.000	56.015.344.000	-		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 07 02 27	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sukoharjo	59.359.421.000	59.359.421.000	-		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 07 02 28	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Karanganyar	55.697.548.000	55.697.548.000	-		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 07 02 29	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Wonogiri	47.126.385.000	47.126.385.000	-		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 07 02 30	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Semarang	58.798.340.000	72.355.340.000	13.557.000.000		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 07 02 31	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Pekalongan	21.946.293.000	21.946.293.000	-		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 07 02 32	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Surakarta	35.545.489.000	35.545.489.000	-		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 07 02 33	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Salatiga	15.015.790.000	15.015.790.000	-		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 07 02 34	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Tegal	17.010.816.000	17.010.816.000	-		
1.20 1.20 00 00 00 5 1 07 02 35	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Magelang	15.712.368.000	15.712.368.000	-		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp.)	(%)	
1 20 1 20 00 00 00 5 1 07 03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa	349.120.000.000	349.120.000.000	-	-	
1 20 1 20 00 00 00 5 1 07 04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.271.055.000	2.271.055.000	-	-	
1 20 1 20 00 00 00 5 1 08	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.000.000.000	16.443.000.000	(13.557.000.000)	(45,2)	
1 20 1 20 00 00 00 5 1 08 01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000	16.443.000.000	(13.557.000.000)	(45,2)	
1 20 1 20 00 00 00 5 1 08 01 01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000	16.443.000.000	(13.557.000.000)	(45,2)	
1 20 1 20 00 00 00 5 2	BELANJA LANGSUNG	-	-	-	-	
1 20 1 20 00 00 00 6	PEMBIAYAAN	240.000.000.000	240.000.000.000	-	-	

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAK PRANOWU

LAMPIRAN III  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 32 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 78 TAHUN  
 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

**DAFTAR HIBAH BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH YANG DIUBAH**

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.676.590.470.000</b>	<b>3.640.637.400.000</b>	<b>964.046.930.000</b>	<b>36</b>
5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.676.590.470.000</b>	<b>3.640.637.400.000</b>	<b>964.046.930.000</b>	<b>36</b>
5 1 4	<b>BELANJA HIBAH</b>	<b>2.676.590.470.000</b>	<b>3.640.637.400.000</b>	<b>964.046.930.000</b>	<b>36</b>
5 1 4 07	<b>Belanja Hibah Dana BOS</b>	<b>2.676.590.470.000</b>	<b>3.640.637.400.000</b>	<b>964.046.930.000</b>	<b>36</b>
5 1 4 07 01	Belanja Hibah Dana BOS kepada Kabupaten Semarang	72.042.310.000	98.678.000.000	26.635.690.000	37
5 1 4 07 02	Belanja Hibah Dana BOS kepada Kabupaten Kendal	76.281.680.000	103.460.400.000	27.178.720.000	36
5 1 4 07 03	Belanja Hibah Dana BOS kepada Kabupaten Demak	75.952.700.000	102.763.600.000	26.810.900.000	35
5 1 4 07 04	Belanja Hibah Dana BOS kepada Kabupaten Grobogan	112.270.610.000	152.137.000.000	39.866.390.000	36
5 1 4 07 05	Belanja Hibah Dana BOS kepada Kabupaten Pati	80.925.920.000	110.476.600.000	29.550.680.000	37
5 1 4 07 06	Belanja Hibah Dana BOS kepada Kabupaten Kudus	53.528.730.000	72.833.200.000	19.304.470.000	36
5 1 4 07 07	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Jepara	76.314.720.000	104.405.400.000	28.090.680.000	37

√

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
5 1 4 07 08	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Rembang	45.019.900.000	61.640.400.000	16.620.500.000	37
5 1 4 07 09	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Blora	69.031.080.000	92.435.600.000	23.404.520.000	34
5 1 4 07 10	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Pekalongan	69.144.250.000	93.669.800.000	24.525.550.000	35
5 1 4 07 11	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Batang	55.160.740.000	75.006.400.000	19.845.660.000	36
5 1 4 07 12	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Pemalang	124.842.460.000	171.135.600.000	46.293.140.000	37
5 1 4 07 13	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Tegal	113.740.220.000	156.358.400.000	42.618.180.000	37
5 1 4 07 14	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Brebes	136.621.220.000	187.519.800.000	50.898.580.000	37
5 1 4 07 15	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Banyumas	128.844.710.000	179.163.200.000	50.318.490.000	39
5 1 4 07 16	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Cilacap	152.384.760.000	206.724.200.000	54.339.440.000	36
5 1 4 07 17	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Purbalingga	69.973.940.000	96.286.400.000	26.312.460.000	38
5 1 4 07 18	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Banjarnegara	70.983.580.000	95.855.800.000	24.872.220.000	35
5 1 4 07 19	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Magelang	82.767.170.000	111.462.000.000	28.694.830.000	35
5 1 4 07 20	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Temanggung	54.143.410.000	73.562.800.000	19.419.390.000	36
5 1 4 07 21	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Wonosobo	66.741.840.000	90.800.200.000	24.058.360.000	36
5 1 4 07 22	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Purworejo	62.295.480.000	85.344.000.000	23.048.520.000	37
5 1 4 07 23	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Kebumen	105.106.400.000	142.765.600.000	37.659.200.000	36
5 1 4 07 24	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Klaten	95.444.880.000	128.891.400.000	33.446.520.000	35
5 1 4 07 25	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Boyolali	70.682.750.000	95.132.200.000	24.449.450.000	35

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
5   1   4   07   26	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Sragen	74.102.530.000	99.987.000.000	25.884.470.000	35
5   1   4   07   27	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Sukoharjo	59.745.130.000	80.146.400.000	20.401.270.000	34
5   1   4   07   28	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Karanganyar	65.814.200.000	90.204.800.000	24.390.600.000	37
5   1   4   07   29	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kabupaten Wonogiri	79.585.850.000	103.094.200.000	23.508.350.000	30
5   1   4   07   30	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Semarang	132.480.690.000	180.322.600.000	47.841.910.000	36
5   1   4   07   31	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Pekalongan	22.234.160.000	31.005.200.000	8.771.040.000	39
5   1   4   07   32	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Surakarta	63.580.460.000	86.355.800.000	22.775.340.000	36
5   1   4   07   33	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Salatiga	17.756.490.000	24.057.000.000	6.300.510.000	35
5   1   4   07   34	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Tegal	25.110.070.000	34.665.400.000	9.555.330.000	38
5   1   4   07   35	Belanja Hibah Dana BOS Kepada Kota Magelang	15.935.430.000	22.291.000.000	6.355.570.000	40
5   1   4   07   36	Dana Cadangan	-	-	-	
		<b>2.676.590.470.000</b>	<b>3.640.637.400.000</b>	<b>964.046.930.000</b>	<b>36</b>

GUBERNUR JAWA TENGAH ,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN V  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR **32** TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 78 TAHUN  
 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

**DAFTAR BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA PROVINSI JAWA TENGAH  
 TAHUN ANGGARAN 2015 YANG DIUBAH**

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
5 1 7	<b>BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>1.947.394.895.000</b>	<b>1.960.951.895.000</b>	<b>13.557.000.000</b>	<b>0,7</b>
5 1 7 02	<b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota</b>	<b>1.596.003.840.000</b>	<b>1.609.560.840.000</b>	<b>13.557.000.000</b>	<b>0,8</b>
5 1 7 02 01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Semarang	33.131.389.000	33.131.389.000	-	-
	<b>I. BANTUAN KHUSUS</b>	<b>33.071.232.000</b>	<b>33.071.232.000</b>	-	-
	<b>A. - FEDEP</b>	<b>75.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	-	-
	- TMD	320.000.000	320.000.000	-	-
	- Profil Daerah	50.000.000	50.000.000	-	-
	- Primatani	125.000.000	125.000.000	-	-
	- PUS	50.000.000	50.000.000	-	-
	- TKPKD	50.000.000	50.000.000	-	-
	<b>B. BANTUAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>18.900.000.000</b>	<b>18.900.000.000</b>	-	-
	1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kalikayen Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-
	2 Peningkatan Jalan Mluweh-Kalikayen-Kawengen Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-
	3 Rehabilitasi Bantaran dan Tanggul Sungai Kali Gung Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-
	4 Pengadaan Peralatan Kesehatan RSUD Ungaran Kab Semarang	4.000.000.000	4.000.000.000	-	-
	5 Peningkatan Jalan Candi Asri Gedongsongo Kel Candirejo Kec Ungaran Barat	400.000.000	400.000.000	-	-
	6 Peningkatan Jalan Taruna - Yos Sudarso Kel Ungaran Kec. Ungaran Barat	500.000.000	500.000.000	-	-

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
	164 Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke S.1 Pendidik PAUD	287.000.000	287.000.000	-	
	165 Bantuan Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal	30.000.000	30.000.000	-	
	166 Bantuan Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI berprestasi	25.000.000	25.000.000	-	
	167 Bantuan Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik	45.000.000	45.000.000	-	
	168 Bantuan Fasilitas Penyelenggaraan UN dan UNPK	456.459.000	456.459.000	-	
	169 Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan	156.450.000	156.450.000	-	
	170 Bantuan Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan	50.000.000	50.000.000	-	
	171 Bantuan Fasilitas Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan.	100.000.000	100.000.000	-	
	172 Bantuan Pengarusutamaan Gender	50.000.000	50.000.000	-	
	173 Bantuan Kursus Mahir Tingkat Dasar Pramuka	100.000.000	100.000.000	-	
	<b>D. Belanja Operasional Bantuan Keuangan Desa Pemula dan Desa Prakarsa</b>	<b>150.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	-	
	<b>II. BANTUAN UMUM</b>	<b>75.676.000</b>	<b>75.676.000</b>	-	
	- Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Umum dari Retribusi Daerah Tera dan Tera Ulang	75.676.000	75.676.000	-	
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Semarang	<b>58.798.340.000</b>	<b>72.355.340.000</b>	<b>13.557.000.000</b>	<b>23</b>
	<b>I. BANTUAN KHUSUS</b>	<b>58.499.721.000</b>	<b>72.056.721.000</b>	<b>13.557.000.000</b>	<b>23</b>
	<b>A. - FEDEP</b>	85.000.000	85.000.000	-	
	- TMMD	320.000.000	320.000.000	-	
	- Profil Daerah	50.000.000	50.000.000	-	
	- PUS	50.000.000	50.000.000	-	
	- Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)	35.000.000	35.000.000	-	
	- TKPKD	50.000.000	50.000.000	-	
	<b>B. BANTUAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>45.500.000.000</b>	<b>59.057.000.000</b>	<b>13.557.000.000</b>	<b>30</b>
	1 Pembuatan Talud Sungai Bringin, Kota Semarang	6.000.000.000	6.000.000.000	-	
	2 Pembangunan Talud Saluran di Muktiharjo Kidul, Pedurungan, Kota Semarang	3.000.000.000	-	(3.000.000.000)	
	3 Peningkatan Sarpras Rusunawa di Kudu Kec. Genuk Kota Semarang	600.000.000	600.000.000	-	
	4 Peningkatan jalan Woltermonginsidi Kota Semarang	8.500.000.000	8.500.000.000	-	

5	1	7	02	30
---	---	---	----	----

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
	5 Peningkatan jalan R. Soekanto, Kota Semarang	6.000.000.000	6.000.000.000	-	
	6 Pengadaan Unit BRT Kota Semarang	5.000.000.000	5.000.000.000	-	
	7 Pembangunan jalan beton di kawasan TPI Mangkang Kulon	5.000.000.000	5.000.000.000	-	
	8 Penanganan Perbaikan lingkungan permukiman Kec. Pedurungan, Tembalang dan banyumanik Kota Semarang	2.000.000.000	2.000.000.000	-	
	9 Kegiatan Perbaikan Sarpras Lingkungan Permukiman di Kota Semarang	7.400.000.000	7.400.000.000	-	
	10 Peningkatan Jalan Di Kecamatan Se-Kota Semarang	2.000.000.000	2.000.000.000	-	
	11 Pembangunan Talud Saluran di Muktiharjo Kidul-Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan	-	3.000.000.000	3.000.000.000	
	12 Pembangunan Lapak sementara Pasar Johar	-	13.557.000.000	13.557.000.000	
	<b>C. BANTUAN PENDIDIKAN</b>	<b>12.409.721.000</b>	<b>12.409.721.000</b>	-	-
	1 Bantuan Penyelenggaraan Gebyar PAUD	20.000.000	20.000.000	-	
	2 Bantuan Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi	20.000.000	20.000.000	-	
	3 Sosialisasi Model Pembinaan kepada PAUD Holistik Integratif	50.000.000	50.000.000	-	
	4 Bantuan Penguatan Organisasi Mitra PAUD	150.000.000	150.000.000	-	
	5 Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SDN Mangunsari 01 Kec. Gunungpati	40.000.000	40.000.000	-	
	6 Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SMP negeri 3 Semarang	45.000.000	45.000.000	-	
	7 Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SMP Negeri 5 Semarang	45.000.000	45.000.000	-	
	8 Bantuan Pengadaan Alat Lab. IPA SMP Negeri 41	75.000.000	75.000.000	-	
	9 Bantuan Pengadaan Alat Lab. IPA SMP Negeri 32	75.000.000	75.000.000	-	
	10 Bantuan Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB	50.000.000	50.000.000	-	
	11 Bantuan Pendampingan BOS SD/SDLB/MI	4.578.540.000	4.578.540.000	-	
	12 Bantuan Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs	3.682.400.000	3.682.400.000	-	
	13 Bantuan Pembelajaran Wisata Edukasi	15.000.000	15.000.000	-	
	14 Bantuan Pembangunan RKB SMAN 13 Semarang	120.000.000	120.000.000	-	
	15 Bantuan Pembangunan RKB SMKN 5 Semarang	120.000.000	120.000.000	-	
	16 Bantuan Pengadaan Alat Bengkel SMK Negeri 3 Semarang	50.000.000	50.000.000	-	
	17 Bantuan Pengadaan Alat Bengkel SMK Negeri 5 Semarang	50.000.000	50.000.000	-	
	18 Bantuan Pengadaan Alat Bengkel SMK Negeri 7 Semarang	50.000.000	50.000.000	-	
	19 Bantuan Pengadaan Alat Bengkel SMK Negeri 8 Semarang	50.000.000	50.000.000	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
20	Bantuan Pengadaan Alat Bengkel SMK Negeri 11 Semarang	50.000.000	50.000.000	-	
21	Bantuan Pengadaan Alat Multimedia SMAN 15 Semarang	50.000.000	50.000.000	-	
22	Bantuan Pengadaan Alat Multimedia SMKN 9 Semarang	50.000.000	50.000.000	-	
23	Bantuan Pengadaan Alat Multimedia SMKN 5 Semarang	50.000.000	50.000.000	-	
24	Bantuan Pengadaan Alat Multimedia SMKN 11 Semarang	50.000.000	50.000.000	-	
25	Bantuan Fasilitas Carier Center SMK Negeri 6 Semarang	50.000.000	50.000.000	-	
26	Bantuan Fasilitas Pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK Negeri 1 Semarang	25.000.000	25.000.000	-	
27	Bantuan Fasilitas Pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK Negeri 2 Semarang	25.000.000	25.000.000	-	
28	Bantuan Fasilitas Pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK Negeri 3 Semarang	25.000.000	25.000.000	-	
29	Bantuan Fasilitas Pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK Negeri 4 Semarang	25.000.000	25.000.000	-	
30	Bantuan Fasilitas Pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK Negeri 5 Semarang	25.000.000	25.000.000	-	
31	Bantuan Fasilitas Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL)SMAN 10 Semarang	20.000.000	20.000.000	-	
32	Bantuan Fasilitas Implementasi SMM ISO SMAN 6 Semarang	25.000.000	25.000.000	-	
33	Bantuan Fasilitas Implementasi SMM ISO SMKN 8 Semarang	25.000.000	25.000.000	-	
34	Bantuan Fasilitas Implementasi SMM ISO SMAN 11 Semarang	25.000.000	25.000.000	-	
35	Bantuan Fasilitas Implementasi SMM ISO SMAN 15 Semarang	25.000.000	25.000.000	-	
36	Bantuan Fasilitas Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA Negeri 1 Semarang	40.000.000	40.000.000	-	
37	Bantuan Fasilitas Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA Negeri 2 Semarang	40.000.000	40.000.000	-	
38	Bantuan Fasilitas Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA Negeri 3 Semarang	40.000.000	40.000.000	-	
39	Bantuan Fasilitas Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA Negeri 4 Semarang	40.000.000	40.000.000	-	
40	Bantuan Beasiswa Siswa SMA/SMK dari Keluarga Kurang Mampu.	646.000.000	646.000.000	-	
41	Bantuan Penyelenggaraan Program Kelas Industri SMK Negeri 6 Semarang	50.000.000	50.000.000	-	
42	Bantuan Penyelenggaraan Program Kelas Industri SMK Negeri 8 Semarang	50.000.000	50.000.000	-	
43	Bantuan Penyelenggaraan Program Kelas Industri SMK Negeri 10 Semarang	50.000.000	50.000.000	-	
44	Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket C	73.000.000	73.000.000	-	
45	Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanitasi SMAN 8 Semarang	10.000.000	10.000.000	-	
46	Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanitasi SMAN 10 Semarang	10.000.000	10.000.000	-	
47	Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanitasi SMAN 12 Semarang	10.000.000	10.000.000	-	
48	Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanitasi SMAN 13 Semarang	10.000.000	10.000.000	-	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
	49 Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanitasi SMAN 14 Semarang	10.000.000	10.000.000	-	
	50 Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanitasi SMAN 16 Semarang	10.000.000	10.000.000	-	
	51 Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanitasi SMAN 1 Semarang	10.000.000	10.000.000	-	
	52 Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanitasi SMKN 4 Semarang	10.000.000	10.000.000	-	
	53 Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanitasi SMKN 5 Semarang	10.000.000	10.000.000	-	
	54 Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanitasi SMKN 8 Semarang	10.000.000	10.000.000	-	
	55 Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanitasi SMKN 9 Semarang	10.000.000	10.000.000	-	
	56 Bantuan Fasilitas Hari Aksara Internasional (HAI)	10.000.000	10.000.000	-	
	57 Bantuan Kursus Kewirausahaan Desa (KWD)	150.000.000	150.000.000	-	
	58 Bantuan Fasilitas Keaksaraan Lanjutan	63.000.000	63.000.000	-	
	59 Bantuan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	50.000.000	50.000.000	-	
	60 Bantuan Fasilitas Penguatan Kelembagaan /LKP untuk Akreditasi	100.000.000	100.000.000	-	
	61 Bantuan Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi	40.000.000	40.000.000	-	
	62 Bantuan Fasilitas Rintisan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Desa Vokasi	50.000.000	50.000.000	-	
	63 Bantuan Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal	30.000.000	30.000.000	-	
	64 Bantuan Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI berprestasi	25.000.000	25.000.000	-	
	65 Bantuan Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik	45.000.000	45.000.000	-	
	66 Bantuan Fasilitas Penyelenggaraan UN dan UNPK	443.681.000	443.681.000	-	
	67 Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan	148.100.000	148.100.000	-	
	68 Bantuan Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan	35.000.000	35.000.000	-	
	69 Bantuan Fasilitas Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan.	100.000.000	100.000.000	-	
	70 Bantuan Pengarusutamaan Gender	50.000.000	50.000.000	-	
	71 Bantuan Kursus Mahir Tingkat Dasar Pramuka	100.000.000	100.000.000	-	
	<b>II. BANTUAN UMUM</b>	<b>298.619.000</b>	<b>298.619.000</b>	-	-
	- Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Umum dari Retribusi Daerah Tera dan Tera Ulang	298.619.000	298.619.000	-	
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Pekalongan	<b>21.946.293.000</b>	<b>21.946.293.000</b>	-	
	<b>I. BANTUAN KHUSUS</b>	<b>21.916.434.000</b>	<b>21.916.434.000</b>	-	

5 1 7 02 31

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
5 1 7 03 29	<b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Se Kabupaten Wonogiri</b>	<b>11.150.000.000</b>	<b>11.150.000.000</b>	-	-
	- Bantuan Keuangan Desa Berdikari 0 x 100.000.000	-	-	-	-
	- Bantuan Keuangan Sarpras Dasar Masyarakat Desa Pemula 111 x 50.000.000	5.550.000.000	5.550.000.000	-	-
	- Bantuan Keuangan Sarpras Dasar Masyarakat Desa Prakarsa 140 x 40.000.000	5.600.000.000	5.600.000.000	-	-
5 1 7 04	<b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik</b>	<b>2.271.055.000</b>	<b>2.271.055.000</b>	-	-
5 1 7 04 01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 4 675.913 x 140	654.628.000	654.628.000	-	-
5 1 7 04 02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa 2.259.365 x 140	316.312.000	316.312.000	-	-
5 1 7 04 03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya 1.962.641 x 140	274.770.000	274.770.000	-	-
5 1 7 04 04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Keadilan Sejahtera 1.147.546 x 140	160.657.000	160.657.000	-	-
5 1 7 04 05	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Golongan Karya 1.786.311 x 140	250.084.000	250.084.000	-	-
5 1 7 04 06	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrat 1.278.619 x 140	179.007.000	179.007.000	-	-
5 1 7 04 07	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Amanat Nasional 1.166.885 x 140	163.364.000	163.364.000	-	-
5 1 7 04 08	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Persatuan Pembangunan 1.181.532 x 140	165.415.000	165.415.000	-	-
5 1 7 04 09	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Nasional Demokrat 762.984 x 140	106.818.000	106.818.000	-	-
<b>JUMLAH BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>1.947.394.895.000</b>	<b>1.960.951.895.000</b>	<b>13.557.000.000</b>	

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GABRIEL PARTOYO